KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

QNRC4851

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

A.1 NPWP : 1 4 1 9 0 8 6 4 0 7 2 2 0 0 0 0 A.2 NIK :				FINAL/TIDAK FINAL			., 5.		
A.1 NPWP : 1 4 1 9 0 8 6 4 0 7 2 2 0 0 0 0 A.2 NIK :	n.z i embetulari Ne insi embatulari H.5 i idak Final								
A.2 NIK : SYAHRANI 3. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG MASA PAJAK (Mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK BRUTO (Rp) DASAR PENGENAAN PAJAK (TINGGI 20% (TIDAK BER (Rp)) DASAR PENGENAAN PAJAK (Mm-yyyy) B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 5 21-402-01 14.690.000 14.690.000 0 15 2.203.500 Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota 8.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 0 9 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyyy 8.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor : Tanggal dd mm yyyyy 8.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR C.3 ID Subunit Organisasi : 0 9 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyyy HARI JUMADI C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.	A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
3. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp) B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 5 21-402-01 14.690.000 14.690.000 0 15 2.203.500 Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota 3.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 0 9 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyyy 3.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB), Pembebasan Ini berdasarkan SKB. Nomor : Tanggal dd mm yyyyy 3.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : DENTITIAS PEMOTONG PAJAK C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 0 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0 C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR C.3 ID Subunit Organisasi : 0 9 dd 0 5 mm 2 0 2 2 2 yyyy HARI JUMADI C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.	A.1 NPWP : 1 4 1 9 0 8 6 4 0 7 2 2 0 0 0								
3. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK BRUTO (Rp) DASAR PENGENAAN PAJAK (TINGGI 20% (TIDAK BRUTO (Rp)) B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 5 21-402-01 14.690.000 14.690.000 0 15 2.203.500 Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 0 3 dd 0 5 mm 2 0 2 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor : Tanggal dd mm yyyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : DIENTITAS PEMOTONG PAJAK C.1 NPWP Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR C.4 Tanggal : 0 9 dd 0 5 mm 2 0 2 2 2 yyyy Bernandatangan : HARI JUMADI C.5 Nama Penandatangan : HARI JUMADI C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.	A.2 NIK :								
MASA PAJAK (MDE OBJEK PAJAK JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp) DASAR PENGENAAN PAJAK (TRIG) 20% (TIDAK BRUTO (Rp) PPh DIPOTONG/DTP (Rp) B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 5 21-402-01 14.690.000 14.690.000 0 15 2.203.500 Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota 8.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 0 9 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy 8.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor : Tanggal dd mm yyyyy 8.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : 8.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : 8.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : 8.12 DENTITAS PEMOTONG PAJAK 6.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A.3 Nama : SYAHRANI								
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK (mp) BRUTO (Rp) BASAR PENGENAAN PAJAK (TIDAK BER- (%) RPh DIPOTONG/DTP (Rp) B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.5 B.6 B.7 5 21-402-01 14.690.000 14.690.000 14.690.000 15 2.203.500 Keterangan Kode Objek Pajak: Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi: Nomor Dokumen Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 0 9 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy B.10 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal DPH Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan: B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: C.1 IDENTITAS PEMOTONG PAJAK C.1 NPWP Instansi Pemerintah RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR C.3 ID Subunit Organisasi: RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR C.5 Nama Penandatangan HARI JUMADI C.6 Pernyataan Wajib Pajak: Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.	B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota 8.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen		KODE OBJEK PAJAK	BRUTO		TINGGI 20% (TIDAK BER-				
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota 8.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7		
Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal D 9 dd D 5 mm D 2 D 2 2 yyyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal D PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK C.1 NPWP Instansi Pemerintah RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR C.3 ID Subunit Organisasi D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	5	21-402-01	14.690.000	14.690.000	0	15	2.203.500		
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR C.3 ID Subunit Organisasi :	Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 0 9 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal dd mm yyyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan: B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:								
tandatangani secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara	C.2 Nama Instan C.3 ID Subunit C C.4 Tanggal	nsi Pemerintah : Organisasi :	RUMAH SAKIT JIWA DAE	RAH ATMA HUSADA MAHAK		LIMANTAN	TIMUR		